BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dalam Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569), banyak sekali dijumpai regulasi berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Salah satu pelanggaran yang peneliti maksud disini adalah pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya disebut tilang.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut Pelanggaran LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalulintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan. Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam

implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.¹ Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat - tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksud UU LLAJ ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

¹ Artidjo, 2014, **Sambutan Seminar Penelitian Pengelolaan Perkara Tilang**, Prosiding Seminar Penelitian Universitas Indonesia Jakarta, 17 Juni 2014, hlm. 27

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh Petugas Penindak yang berdasarkan kewenangannya yaitu Penyidik dan Penyidik Pembantu pada fungsi lalu lintas Polri. Penyidik adalah penyidik Polri yang bertugas pada Fungsi Lalu Lintas Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan Penyidik Pembantu adalah penyidik pembantu pada Fungsi Lalu Lintas Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.²

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak

² A.Y.Effendi E. Putri, & Diana L, 2015, **Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 4.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut E-Tilang. Penindakan Pelanggaran LLAJ dengan Sistem E-Tilang adalah proses penyidikan dan penuntutan menurut acara pemeriksaan cepat Pelanggaran LLAJ tertentu dengan menggunakan Surat Tilang Elektronik. Sistem E-Tilang adalah jaringan kerja prosedur Polri, Perbankan, Pengadilan dan Kejaksaan yang saling berkaitan, bekerja sama dan berinteraksi dalam penyelesaian perkara pelanggaran LLAJ tertentu, untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UULLAJ dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU RI No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemberlakuan E-Tilang memang dirasa dapat memberikan jawaban atas proses transparansi penyelesaian tilang yang dielukan oleh masyarakat pada zaman ini, Tentu saja hal ini diharapkan akan menciptakan kepastian hukum. Kepastian Hukum diartikan sebagai penjelasan norma perilaku yang dapat dijadikan petunjuk bagi masyarakat sebagai penerima

peraturan ini.³ Namun kenyataan di lapangan adalah masih terdapat kendala dalam pelaksanaan e-tilang di lapangan. Penulis menemukan fakta bahwa kenyataannya jika dilihat dari data banyaknya berkas pelimpahan tilang yang masuk ke Polda Bali sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa e-tilang ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat pada data di Direktorat Satuan Lalu Lintas Polda Bali tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Agustus bahwa terdapat pelanggar lalu lintas sejumlah 1.168.890 pelanggar, yang merupakan data pelanggaran yang tertangkap kamera sejumlah 1.110.777 pelanggar dan pelanggar yang sudah Valid melanggar Hukum sebanyak 58.113 pelanggar sehingga adanya ketidaksesuaian antara norma yang ada (das sollen) dengan penerapan fakta norma di masyarakat (das sein) dan /atau kesenjangan antara das sollen (normatif) dengan das sein (empiris).

Negara Indonesia dalam proses penyelesaian segala bentuk tindak pidana tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 menjabarkan bahwa "Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan". Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu perbuatan yang

³ Tata Wijayanta, 2014, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 14 No. 2, hlm 73.

melanggar ketentuan undang-undang merupakan tindak pidana yang menimbulkan sanksi pidana.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul "**Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali**".

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Kendala dalam penerapan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah.

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Efektifitas Pelaksanaan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali dan faktor pendukung serta kendala dalam penerapan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.4. Tujuan Penelitian.

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah ;

1.4.1. Tujuan Umum.

- Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

- Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus.

- Untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan E- Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali.
- Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Kendala dalam penerapan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴

1.5.2. Jenis Pendekatan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga

⁴ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.⁵

1.5.3. Sumber Bahan Hukum.

Sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, penulis harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya itu. Sumber data menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer.

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar dalam memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara dan mendapatkan data yang berkaitan dengan Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) di Wilayah Hukum Polda Bali Serta Pengaruh E-Tilang Terhadap Pengendara Di Wilayah Hukum Polda Bali.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang –undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

1.5.4. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.⁶ Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilaksanakan dengan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu Kanit II Langgar Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Bali An. I Made Adi Sutapa, S.H., Pangkat Ajun Komisaris Polisi, Nrp 70121105. Kasat Lantas Polres

⁶ Abdurrahman Fatoni, 2011, **Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

Karangasem Polda Bali An. Komang Saptapramana, S.I.K., Pangkat Ajun Komisaris Polisi, Nrp 91100466 dan Pelanggar (Responden) Lalin An. Ketut Suwita.

2. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁷ Sebagai dokumentasi dalam skripsi ini berupa catatan, foto-foto, dan rekaman wawancara.

1.5.5. Teknik Analisa Data.

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁷ A. Kadir Ahmad, 2003, **Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif**, Indobis Media Centre, Makasar, hlm. 106.

1.6. Sistematika Penulisan.

Hasil Penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1.6.1. BAB I : PENDAHULUAN.

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.6.2. BAB II : KAJIAN TEORITIS.

Bab ini akan membahas tentang teori peranan, teori sistem hukum, definisi Pelanggaran Lalu Lintas, definisi Tilang Elektronik, dan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis Tilang Elektronik.

1.6.3. BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1.

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai Efektifitas Pelaksanaan E- Tilang di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.6.4. BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2.

Pada bab ini membahas mengenai Faktor Pendukung dan Kendala dalam Penerapan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.6.5. BAB V : PENUTUP.

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.